

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tanggung jawab perusahaan menjadi semakin luas. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemilik modal tapi juga bertanggung jawab terhadap karyawan, masyarakat, serta konsumen. Perusahaan perlu memperhatikan masyarakat dan pihak-pihak lain karena mereka ikut merasakan dampak dari setiap kegiatan perusahaan dan mereka juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan sering disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Karena jika perusahaan hanya berfokus pada kondisi keuangan saja maka perusahaan tidak dapat menjamin nilai perusahaan tersebut secara berkelanjutan. Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (*shareholder*), tapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). CSR menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lingkungan perusahaan dituntut untuk melakukan tindakan pertanggungjawaban sosial. Kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan hendaknya dilakukan meliputi tujuh aspek yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Kegiatan sosial perusahaan biasanya diungkapkan dalam laporan tahunan. Berdasarkan UU No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 mewajibkan perusahaan untuk menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya informasi operasional perusahaan yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan CSR.

Dalam prakteknya tidak semua perusahaan memberikan laporan lengkap mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada kalanya perusahaan hanya mengungkapkan sebagian dari aspek-aspek yang seharusnya diungkapkan. Dengan adanya fenomena tersebut maka muncul suatu pertanyaan hal apa yang menyebabkan adanya perbedaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan pengungkapan CSR adalah kepemilikan saham pemerintah. Perusahaan pemerintah yang selanjutnya disebut BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan BUMN hendaknya memberikan pengungkapan CSR yang lebih lengkap mengingat adanya ekspektasi yang lebih dari masyarakat akan perusahaan BUMN. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

BUMN merupakan perusahaan milik pemerintah yang keberadaannya sangat berpengaruh dalam sistem ekonomi Indonesia. Menurut UU RI No 19 tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Dilihat dari tujuannya nampak jelas bahwa adanya BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Jadi tujuan BUMN di sini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi juga harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada 20 September 2012. Beliau mengungkapkan bahwa pemerintah tidak semata-mata hanya memprioritaskan BUMN untuk

membayar deviden, namun pemerintah menginginkan agar BUMN memiliki nilai tambah dalam bentuk nilai perusahaan yang tumbuh dan tujuan mulia lainnya adalah BUMN meningkatkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Hal tersebut diungkapkan sebagai tanggapan dari pernyataan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan yang berharap agar pembayaran dividen BUMN bisa dikurangi dengan alasan agar BUMN dapat mendorong pembangunan infrastruktur. Namun menteri keuangan tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena menurutnya pembayaran dividen tetap harus dilakukan karena pembayaran dividen dapat dikelola dan dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat (Berita Satu, September 2012).

Tekanan pemerintah dan publik yang kuat membuat perusahaan harus lebih transparan dalam pengelolaannya. Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai salah satu media pelaporan pertanggungjawaban manajemen mereka sebagaimana diatur dalam UU PT No. 40 Tahun 2007. Pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008), Angling Mahatma (2010), dan penelitian Rustiarini (2010), menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR di Malaysia. Demikian juga penelitian yang dilakukan Septiadini (2010) yang menemukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan dari CSP antara BUMN dan BUMS. Namun Ketidakkonsistenan

penelitian terdahulu ditunjukkan oleh penelitian Machmud dan Djakman (2008) bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Desie (2010), dimana Desie melakukan penelitian untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, tipe industri, ukuran perusahaan, perusahaan BUMN dan non BUMN terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR DISCLOSURE*) pada perusahaan di BEI Tahun 2009. Dan pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada satu variabel yaitu perusahaan BUMN dan non BUMN. Dengan demikian dapat dilihat apakah terdapat perbedaan pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN dan non BUMN. Selain itu perbedaan juga terdapat pada jenis penelitian, Desie menggunakan penelitian korelasi sedangkan peneliti menggunakan penelitian komparasi.

Peneliti tertarik untuk membandingkan perusahaan BUMN dan non BUMN karena BUMN merupakan perusahaan yang banyak menjadi sorotan masyarakat mengingat sebagian besar saham BUMN dimiliki oleh negara yang artinya juga dimiliki oleh rakyat. Selain itu pengelolaan BUMN juga dilakukan oleh pemerintah atau di bawah pengawasan pemerintah. Maka masyarakat cenderung memiliki ekspektasi yang tinggi akan perusahaan BUMN termasuk dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Mengingat pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya BUMN mengungkapkan CSR lebih luas dibandingkan perusahaan swasta.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat pengungkapan CSR antara perusahaan BUMN dengan perusahaan non BUMN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) antara perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Para pelaku bisnis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi baik oleh manajemen ataupun para pemilik modal dalam mengambil kebijakan mengenai tindakan CSR yang diterapkan serta pengungkapannya dalam laporan tahunan.
2. Bagi pemerintah dan lembaga-lembaga pembuat peraturan akuntansi keuangan, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan peraturan atau undang-undang mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial.
3. Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para akademisi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sisematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Terdiri dari telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menentukan sampel, mengumpulkan data, mendefinisikan variabel penelitian dan cara menganalisis data penelitian. Bagian ini terdiri dari jenis penelitian, ukuran populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, instrumen penelitian, model penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang paling bermakna karena memuat bukti hasil penelitian. Bab ini terdiri dari hasil pengumpulan data penelitian, statistik deskriptif, hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis secara terpadu.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban permasalahan penelitian berdasarkan analisis dan pembahasan. Saran merupakan anjuran yang meliputi aspek operasional, kebijakan, maupun konseptual berdasarkan kesimpulan, yang ditujukan kepada perusahaan yang menjadi objek penelitian, peneliti berikutnya, dan pembaca skripsi.